



Implementasi Program Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) di Desa Halong Kota Ambon

Nicolin Tentua^{1*}, Zainal Abidin Rengifurwarin¹, Hengky R Pattimukay¹

¹ Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Corresponding author email: sofpiatuhumury@gmail.com

Article Info

Article history:

Received May 15, 2024

Approved June 17, 2024

Keywords:

Program Implementation, Family Planning, KB Village, Data House.

ABSTRACT

This research was a qualitative descriptive study with aims to explore facts regarding the implementation of the development of family planning villages in Halong village, Baguala district, Ambon City. This research conducted at the Population of Family Planning Agency and people belonging to couples of childbearing age in Halong village. The data collected through interviews, observation and documentation of some informants who were directly involved in the implementation process of the Family Planning Village program in Halong village, Baguala district. The data collected has processed and analyzed using qualitative descriptive analysis techniques. The results of the data analysis showed that, in general, the implementation of the Family Planning Village program in Halong village was going well. Thus it can be seen from several programs that have been running, including the elderly integrated healthcare center and data house.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggali fakta mengenai implementasi pengembangan kampung keluarga berencana (kampung KB) di Negeri Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan masyarakat yang tergolong pasangan usia subur di Negeri Halong. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap sejumlah informan yang terlibat secara langsung dalam proses implementasi program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) di Negeri Halong. Data yang berhasil dikumpulkan setelah diolah, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa, dalam implementasi program Kampung KB di Negeri Halong secara umum berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari terjadinya beberapa program yang telah berjalan diantaranya posyandu lansia dan rumah data.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Tentua, N., Abidin Rengifurwarin, Z., & Pattimukay, H. (2024). Implementasi Program Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) di Desa Halong Kota Ambon. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1718–1729. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2694>

PENDAHULUAN

Kependudukan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa negara khususnya di Indonesia, perlu penanganan program – program kerja secara efektif dan optimal. Karena permasalahan kependudukan menjadi suatu permasalahan yang cukup kompleks, permasalahan tersebut diantaranya pernikahan usia dini, angka kematian bayi dan ibu melahirkan yang masih tinggi, dan masih cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk menjadi permasalahan kependudukan bisa menjadi sebuah masalah krusial yang tidak dapat dihindarkan. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang terus menerus akan terjadi berbagai masalah, seperti masalah kualitas sumber daya manusia yang menurun, pengangguran, lapangan kerja, kejahatan, dan lainnya yang akan memberi dampak negatif bagi kehidupan di Indonesia khususnya. Permasalahan pertumbuhan penduduk di Indonesia perlu menjadi perhatian yang serius dari semua pihak, baik pihak pemerintah maupun pihak non pemerintah. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menjadi salah satu kendala yang sangat berat dalam pembangunan di beberapa sektor di Indonesia. Jika tidak ditangani, maka berakibat pada meningkatnya kemiskinan serta kesehatan masyarakat juga akan menurun, sehingga daya saing dari suatu bangsa semakin rendah. Dari permasalahan tersebut maka perlu adanya suatu kebijakan program pengendalian penduduk.

Jumlah penduduk yang tinggi tentu bukan persoalan yang mudah dalam mengatasi persoalan kependudukan. Diperlukan usaha dan upaya yang berkelanjutan dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan pembuatan kebijakan dari pemerintah yang memiliki peran dan tanggungjawab dalam menangani masalah pertumbuhan penduduk. Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam penanganan masalah kependudukan salah satunya dengan pencanangan Program Keluarga Berencana (KB). Namun program tersebut dirasa lambat laun melemah dari berbagai sudut persoalan, mulai dari pencapaian peserta KB yang mengalami penurunan dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program tersebut. Kampung KB merupakan suatu wadah untuk mengimplementasikan kegiatan - kegiatan prioritas program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta program pembangunan lainnya dilini lapangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/70/SJ Tanggal 11 Januari 2016 perihal Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB, dan Surat Kepala BKKBN Pusat No. 046/BL/200/B4/2016 Tanggal 12 Januari 2016 Perihal Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB di seluruh Indonesia, maka melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yang memiliki visi “menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas” memiliki kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk terwujudnya cita-cita pembangunan Indonesia yang terdapat dalam Nawacita terutama pada agenda prioritas ke 3 yaitu “Memulai pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, serta agenda prioritas ke 5 yaitu “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia” dan agenda prioritas ke 8 yaitu “Melakukan revolusi karakter bangsa”, BKKBN diberi mandat oleh Presiden RI agar mengimplementasikan program Kampung KB.

Kampung KB merupakan Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK yang dilakukan secara sistemik dan sistematis. Selain itu, manfaat Kampung KB selain bisa mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Intinya program ini melibatkan semua sektor pembangunan. Dengan kata lain, Kampung KB tidak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan. Manfaat lain adalah membangun masyarakat berbasis keluarga, mensejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor. Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran berbagai pihak seperti swasta, provider, dan pemangku kepentingan lainnya. Integrasi lintas sektor berupa pelayanan terpadu antar sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan KB, pelayanan pembuatan akta, pembangunan jalan dan jembatan, pembuatan ktp, pendiaan buku-buku bacaan, posyandu, PAUD, P2WKSS, dll.

Kegiatan yang dilakukan pada Kampung KB tidak hanya berperan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk serta tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan kontrasepsi, akan tetapi Kampung KB merupakan program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya. Kampung KB merupakan suatu wadah yang dapat dijadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat dengan berbagai macam program yang mengarah pada upaya merubah sikap, perilaku dan cara berfikir (mindset) masyarakat kearah yang lebih baik. Melalui program ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menjadikan Kampung KB sebagai program prioritas di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya mengoptimalkan peran pemerintah daerah agar ikut andil dalam pelaksanaan program ini serta dapat bersentuhan langsung dan memberikan manfaat pada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah. Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. BKKBN akan bekerjasama dengan Kementerian, lembaga terkait serta organisasi lintas sektor dalam pengembangan Kampung KB kedepan.

Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam Kampung KB yaitu kegiatan dari lintas sektor dan kegiatan dari sisi ketahanan keluarga, seperti pembentukan serta pengembangan kelompok-kelompok kegiatan, diantaranya: Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan kelompok dengan upaya meningkatkan pengetahuan, kesadaran serta keterampilan ibu maupun anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balita yang dimiliki dalam keluarga. Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan program yang mengupayakan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan. Bina Keluarga Lansia (BKL) merupakan program dengan serangkaian kegiatan dilakukan untuk peningkatan pengetahuan, dan keterampilan keluarga yang lanjut usia dalam perawatan, pengasuhan serta pemberdayaan lansia. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan kelompok usaha ekonomi produktif yang terdiri dari berbagai segmen, seperti Keluarga Sejahtera.

Program Kampung Keluarga Berencana dikembangkan pada tingkatan wilayah di Indonesia, termasuk wilayah Kota Ambon, tepatnya di Kecamatan Baguala, Kota Ambon Negeri Halong telah terpilih menjadi kampung Keluarga Berencana karena terbilang kampung yang tertinggal dan tingkat kesejahteraan warganya masih rendah. Pertumbuhan penduduk Negeri Halong dari tahun ke tahun kian bertambah.

Kepadatan penduduk yang disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan penduduk yang sulit diatasi adalah: Pertama, laju pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan kelahiran yang tinggi dan kebutuhan bahan pokok yang meningkat (pangan). Kedua, penyebaran penduduk tidak merata menyebabkan mobilitas yang rendah. Ketiga, peningkatan jumlah penduduk dalam umur sekolah yakni, kebutuhan dan kesempatan belajar yang meningkatkan, arus urbanisasi yang meningkat, selain mengalami kepadatan penduduk. Perbandingan angka kelahiran yang terdapat di Negeri Halong setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis. Dengan kondisi seperti ini Negeri Halong, mendapat perhatian dari pemerintah dan pemerintah daerah, sehingga ditunjuk menjadi salah satu Negeri yang mendapatkan Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB), karena memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai kampung KB dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Idealnya sebuah kampung KB, masyarakat di dalamnya seharusnya berpartisipasi pada seluruh program kampung KB sebagai pelaksanaan teknisnya. Namun kenyataannya setelah berdirinya kampung KB di negeri Halong, tahun 2017, tingkat kearifan warga untuk menjadi peserta aktif masih kurang bila dibandingkan dengan desa atau negeri lainnya di Kota Ambon.

Selaras dengan salah satu misi dari BKKBN. Namun, untuk mewujudkan misi tersebut, BKKBN terhalang oleh adanya budaya patriarki dalam gender yang merupakan suatu sistem yang menempatkan kekuasaan laki-laki diatas perempuan dalam segala aspek kehidupan. Secara tradisional, pola sistem patriarki menempatkan seorang istri sebagai pihak yang mengurus urusan pekerjaan domestik misalnya masalah dalam lingkup rumah tangga saja, Nasib istri bergantung pada suami, maka peran istri dibatasi pada tugas - tugas domestik, seperti ungkapan Jawa bahwa tugas istri hanyalah “macak, masak, manak”. Sesuai dengan hasil Konferensi Kependudukan dan Pembangunan Sedunia (ICPD) yang dijelaskan pada jurnal United Nations, menjelaskan bahwa kebijakan kependudukan terutama dalam kebijakan kesehatan reproduksi, merupakan salah satu determinan yang penting dari pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia. Namun, terdapat perubahan paradigma dalam permasalahan kependudukan dan pembangunan, dari pendekatan pengendalian populasi dan fertilitas, menjadi pendekatan yang berfokus pada hak reproduksi serta hak kesehatan reproduksi perorangan (Nations, 1995). Temuan penelitian Endah, dkk (2019) masih minimnya partisipasi Masyarakat (Endah, dkk, 2019), perubahan ketrampilan dan sikap (Nurbaena, 2020), kurangnya fasilitas dan sarana pendukung (Rahim, 2023), kelompok sasaran (Amiyati, dkk, 2023), kolaborasi dan sumber daya pendukung (Sugianto, 2021).

Sebagaimana diketahui bahwa pemenuhan hak - hak dasar kesehatan reproduksi meliputi hak - hak dasar baik pada pasangan maupun individu dalam memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab terkait permasalahan untuk jumlah, jarak, maupun waktu memiliki anak. Begitu juga dengan UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dijelaskan di bab VI pasal 24 ayat (1) bahwa pelayanan kontrasepsi diselenggarakan dengan tata cara yang berdaya guna dan berhasil guna, serta diterima maupun dilaksanakan secara bertanggungjawab oleh pasangan suami istri dengan pilihan mempertimbangkan kondisi kesehatan suami istri. Sehubungan dengan UU tersebut, sudah jelas bahwa suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta kedudukan yang sederajat dan harus ikut terlibat dalam mengikuti program kampung KB sehingga sama – sama berperan aktif menentukan menentukan alat kontrasepsi yang digunakan untuk pengatur kelahiran, agar cukup memiliki dua jumlah anak dalam rangka komitmen membentuk keluarga kecil bahagia sejahtera. Dalam realiasnya, masih terdaoat kecenderungan para pasangan usia subur untuk

terus menambah jumlah kelahiran anaknya, hal ini berimbas pada tingkat kualitas kesehatan dan keluarga, Jumlah kelahiran anak yang harusnya disepakati bersama antara pasangan suami isteri, dalam kenyataan menjadi didominasi oleh para suami, keadilan dan kesetaraan gender kurang memperoleh perhatian. Sesuai hasil pengamatan awal yang dilakukan, ternyata terdapat pula di Negeri Halong. Karena itu, Negeri Halong dijadikan salah satu lokasi dibentuk program kampung KB tahun 2016. Dan implementasi program kampung KB baru dilakukan pada tahun 2018.

Tentu saja dituntut agar aparat pelaksana dapat berhasil atau efektif dalam mengimplementasi program kampung KB tersebut, tercapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan baik dan optimal. Wujud dari efektifnya implementasi program kampung KB, dapat dilihat dari: (a) dilakukan sosialisasi program kampung KB kepada masyarakat, (b) keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi yang dilakukan, (c) memperoleh layanan KIE, KB dan alat kontrasepsi, serta (d) keberhasilan program kampung KB. Akan tetapi. Berhasil atau tidaknya implementasi suatu kebijakan, termasuk program KB tersebut dari sisi teoritis dan prakteknya, dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambatnya, diantaranya faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dan lain-lain. Berdasarkan latar belakang dan fenomena – fenomena atau beberapa gejala yang telah dikemukakan diatas, dianggap menjadi hal – hal yang bersifat penting dan menarik perhatian untuk dilakukan penelusuran dan pengakajian lebih jauh untuk mengetahui realitas sebenarnya dibalik fenomena – fenomena tersebut dengan mengangkat judul “Implementasi Program Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) Di Negeri Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon.”

METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali fakta mengenai Implementasi Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) di Negeri Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dan Masyarakat Negeri Halong, Kecamatan Baguala Kota Ambon. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif deksriptif, yang dengan mengkaji data dimulai dengan menelaah, menyusun dalam satu kesatuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta mendefenisikannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interprestasi data dan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Implementasi Program Pengembangan Kampung KB

Analisis hasil penelitian berkaitan dengan efektivitas implementasi program Kampung KB, dikemukakan melalui beberapa dimensi yang digunakan untuk mengukur konsep ini, secara runut sebagai berikut:

Sosialisasi Program Kampung KB

Sosialisasi mengenai program pengembangan kampung KB merupakan salah satu aspek atau dimensi yang digunakan untuk melihat dan mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan atau implementasi program pengembangan kampung KB di suatu desa atau negeri. Intensif atau tidaknya pelaksanaan kegiatan sosialisasi program pengembangan kampung KB bagi warga masyarakat, terutama mereka yang tergolong sebagai pasangan usia subur (PUS), untuk memberikan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran mengenai arti pentingnya peran serta mereka dalam mendukung pelaksanaan program kampung KB di lingkungan desa atau negeri mereka.

Salah satu pengertian sosialisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2016) adalah suatu upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, merupakan pengertian yang paling dapat diterima dalam konteks kajian kebijakan publik. Bahwa kebijakan publik yang telah dihasilkan perlu diketahui oleh masyarakat sehingga kebijakan tersebut selain dapat terlaksana dengan baik juga mendapat dukungan masyarakat. Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk melakukan pengendalian sosial (social control) apabila suatu masyarakat ingin berfungsi efektif, maka para anggota masyarakat harus berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang mengatur pola hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sosialisasi yakni individu – individu menjadi anggota masyarakat yang dikendalikan sehingga tidak melakukan perilaku menyimpang. Sosialisasi adalah upaya membentuk kebiasaan, keinginan dan adat istiadat (Rusdiyanta, 2009:). Temuan Herizal (2020), akuntabilitas implementasi (Herizal, dkk, 2020), pelayanan yang cepat dan responsif (Selanno, 2021), standar pelayanan (Ibrahim, dkk, 2021), efektifitas pelayanan (Ibrahim, dkk, 2020).

Sosialisasi suatu kebijakan atau program pada dasarnya adalah proses penyampaian sesuatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik secara langsung atau berhadapan – hadapan (face to face) maupun secara tidak langsung melalui penggunaan berbagai media. Sosialisasi mengenai pelaksanaan program pengembangan kampung KB tersebut, dilakukan oleh para petugas dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, melalui media tatap muka, brosur, leaflet, dan media online kepada kelompok target, terutama mereka warga masyarakat yang tergolong pada kelompok pasangan usia subur. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan dapat berlangsung secara berkala, yang dilaksanakan pada waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam bulan yang berjalan. Untuk mengetahui data dan informasi mengenai pelaksanaan sosialisasi mengenai pengembangan program KB oleh petugas yang berkompeten, dilakukan pendekatan dan wawancara dengan para informan penelitian ini. Karena itu diadakan pendekatan dan wawancara informan Prematur Kampung KB (Ibu M.Matulesy, Bapak Mardiman, dan Ibu S.Tupenalay. Ketiga Informan ini memberikan tanggapan sebagai berikut:

“ Kami selaku petugas yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan program pembentukan kampung KB di Negeri Halong Kecamatan Baguala, memang mengetahui secara jelas bahwa, kegiatan sosialisasi sebagai tahapan awal pelaksanaan program ini, dilakukan melalui penggunaan media, seperti tatap, penyediaan dan penyebaran brosur dan leaflet, serta media online, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, dan pemahaman mengenai arti pentingnya program pengembangan kampung KB bagi peningkatan tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, serta kesadaran dan keikutsertaan selaku peserta kampung KB. Harus diakui bahwa sosialisasi, tersebut pada umumnya dilaksanakan dua kali dalam satu bulan yang melibatkan warga masyarakat, terutama mereka yang tergolong pasangan usia

subur atau PUS memahami mengenai manfaat menjadi peserta KB, diantaranya jumlah kelahiran anak dan jarak kelahiran anak dapat dikendalikan “, (Wawancara, tgl 03 - 04 Oktober 2023).

Dari hasil – hasil wawancara dengan informan diatas, nampak dengan jelas bahwa petugas yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan program pengembangan kampung KB di Negeri Halong Kecamatan Baguala, memang mengetahui dengan jelas bahwa, kegiatan sosialisasi sebagai tahapan awal pelaksanaan program ini, dilakukan melalui penggunaan media, seperti tatap muka, penyediaan dan penyebaran brosur dan leaflet, serta media online, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman mengenai arti pentingnya program pengembangan kampung KB bagi peningkatan tingkat kesejahteraan keluarga, serta kesadaran dan keikutsertaan selaku peserta kampung KB. Harus diakui bahwa sosialisasi, tersebut pada umumnya dilaksanakan dua kali dalam satu bulan yang melibatkan warga masyarakat, terutama mereka yang tergolong PUS (pasangan usia subur).

Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi pengembangan Kampung KB

Keterlibatan masyarakat dalam mengikuti sosialisasi program kampung KB merupakan salah satu dimensi atau aspek penting yang menjadi salah satu ukuran untuk melihat mengenai tinggi atau rendahnya tingkat efektivitas implementasi suatu program kegiatan, terutama program kampung KB oleh petugas pelaksana di suatu desa atau negeri. Keterlibatan merupakan partisipasi yang secara mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja - pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu. Partisipasi sering diartikan secara sederhana sebagai peran serta seseorang atau suatu kelompok dalam suatu lingkungan kegiatan. Peran serta (partisipasi) menunjukkan suatu proses antara dua atau lebih pihak (individu atau kelompok) yang mempengaruhi satu terhadap yang lainnya dalam membuat rencana, kebijakan, dan keputusan (Sinambela dkk, 2006: 37). Partisipasi masyarakat dalam konteks apa pun akan menjadi salah kunci untuk memadatkan nilai – nilai kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik, termasuk partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan suatu kegiatan sosialisasi.

Sosialisasi adalah suatu usaha untuk memberikan informasi tentang suatu kabar atau berita. Zaudan (2002) dalam (Dian Herdiana, 2018) mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses interaksi sosial yang mana seorang individu mengenai cara berpikir, berperasaan, dan bertingkah laku yang akan membuatnya berperan dalam suatu lingkungan masyarakat. Adapun sosialisasi merupakan proses seseorang memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang diperlukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat. Menurut Widjaja (2008), bahwa sosialisasi program adalah proses mengkomunikasikan program – program suatu organisasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pengenalan dan penghayatan dalam lingkungan tertentu. Agar dapat mengetahui data dan informasi mengenai keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi pengembangan Kampung KB oleh petugas yang berkompeten, dilakukan pendekatan dan wawancara dengan para informan penelitian ini. Karena itu diadakan pendekatan dan wawancara informan Prematur Kampung KB (Ibu M.Matulesy, Bapak Mardiman, dan Ibu S.Tupenalay. Ketiga Informan ini memberikan tanggapan sebagai berikut:

“ Ketika sosialisasi mengenai pentingnya keterlibatan warga masyarakat menyukseskan program KB, melalui pembentukan kampung KB di negeri ini, maka mengundang kehadiran warga masyarakat, karena diketahui bahwa sangat membutuhkan keterlibatan dan dukungan warga masyarakat, karena selalu ada penyuluhan yang disampaikan. Kegiatan sosialisasi program KB tersebut dilakukan dua kali dalam satu bulan. Ada warga masyarakat yang mengetahui dan memahami serta bersedia menerima pembentuk program KB di negeri. Meskipun demikian, ada pula warga yang menolak program KB dengan alasan bahwa wilayahnya masih luas jadi perlu banyak anak menjadi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan kedepannya. Namun setelah petugas Pokja dan BKKBN memberikan pemahaman baru disitu tumbuh kesadaran masyarakat menerima pembentukan kampung KB tersebut ”, (Wawancara, tgl 03 – 04 Oktober 2023).

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, nampak dengan jelas bahwa warga masyarakat, terutama perwakilan kepala keluarga pasangan usia subur (PUS) memiliki kesediaan untuk ikut serta atau terlibat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi program KB dan langkah persiapan pembentukan kampung KB di Negeri Halong yang dilakukan dua kali dalam satu bulan, dengan memberikan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran kepada warga masyarakat sehingga mereka bersedia menerima dan mendukung pelaksanaan program kampung KB, karena menyadari mengenai manfaat positif dari program KB dimaksud, bisa mengendalikan jumlah anak hanya dua orang, dan jarak anak yang dilahirkan minimal 3 tahun, sehingga membuat keluarga menjadi bahagia dan sejahtera.

Memperoleh Layanan KIE KB dan Alat Kontrasepsi

Memperoleh layanan komunikasi, informasi dan edukasi KB atau KIE KB dan alat kontrasepsi menjadi salah satu aspek atau dimensi penting untuk melihat dan mengukur tingkat efektivitas implementasi program kampung KB di suatu desa atau negeri. Pemberian layanan KIE KB dan alat kontrasepsi merupakan salah satu tugas yang bertujuan menyampaikan segala informasi tentang program KB, untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk agar dapat diketahui masyarakat secara langsung, mengetahui jadwal pelayanan KB maupun yang ingin berkonsultasi dengan petugas KB keliling. Tim KIE KB terdiri dari Penyuluh Keluarga Berencana, dan Kader Desa/Negeri.

Petugas KIE KB menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak kelahiran anak. Paling tidak jarak antara anak pertama dan kedua tiga tahun harapannya, dengan mengikuti program KB pendidikan anak terjamin, rumah tangga bahagia dan sejahtera. Padatnya penduduk Indonesia menjadikan program KB menjadi program nasional yang harus disukseskan. Dalam proses pemberian layanan KIE KB dan Alat kontrasepsi tersebut oleh TIM KB menyampaikan berbagai informasi mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam menyukseskan program KB dan perlunya penggunaan alat kontrasepsi. Istilah kontrasepsi berasal dari kata kontra dan sepsi, kontra yang berarti “melawan” atau “mencegah” sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud kontrasepsi ialah menghindari/mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dan sel sperma.

Alat kontrasepsi terdapat dua jenis, yaitu kontrasepsi hormonal dan kontrasepsi non hormonal. Kontrasepsi hormonal dapat dibagi sebagai Pil KB, Suntik KB dan Susuk KB atau Implan. Guna mengetahui data dan informasi mengenai pemberian layanan KIE KB dan Alat Kontrasepsi oleh petugas yang berkompeten, dilakukan pendekatan dan wawancara dengan para informan penelitian ini. Atas dasar itu, diadakan pendekatan dan wawancara dengan

Informan Kepala Negeri Halong (Ibu S. Tupenalay, dan sekretaris Bapak O. Apituley). Kedua informan ini memberikan tanggapan sebagai berikut:

“ Kami kami selaku unsur pimpinan di negeri ini selalu berusaha mendorong warga masyarakat, terutama yang menjadi PUS untuk dapat aktif mengikuti pemberiaan layanan KIE KB oleh petugas Pokja kampung dari BKKBN dan Pokja kampung di negeri ini sehingga dapat memperoleh informasi, pengetahuan dan pemahaman tentang alat – alat kontrasepsi KB dan tata cara penggunaan serta manfaat berkaitan dengan upaya pengendalian jumlah kelahiran anak hanya dua dan menjaga jarak kelahiran anak minimal 3 tahun, sehingga keluarga menjadi bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian demikian diharapkan, implementasi program KB pada kampung KB ini dapat berjalan dengan lancar dan meraih sukses seperti diharapkan bersama ”, (Wawancara, tgl 03 - 04 Oktober 2023).

Sesuai dengan hasil – hasil wawancara dengan para informan diatas, ketika layanan KIE (sosialisasi) diberikan keterlibatan masyarakat di kampung KB terhadap program KB sangat baik, karena petugas dari Pokja BKKBN dan Pokja Negeri Halong, ketika memberikan layanan KIE KB, menjelaskan dan memberikan informasi tentang alat kontrasepsi yang diantaranya ada banyak sekali manfaat yang masyarakat (PUS) terima, berupa: peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang alat kontrasepsi, kemudian PUS yang tadinya tidak terlayani untuk pemasangan alat itu PUS terlayani, termasuk kesehatannya. Pemakaian alat kontrasepsi seperti: alat suntik KB, dan Pil KB. Untuk KB suntik biasanya dilakukan satu kali dalam dua bulan. Sedangkan Pil KB biasanya diminum satu bulan satu kali.

Keberhasilan Program Kampung KB

Keberhasilan jalannya program Kampung KB merupakan salah satu dimensi atau aspek penting yang menjadi ukuran untuk melihat dan mengetahui tingkat efektivitas implementasi program kampung KB di suatu lokasi pada desa atau negeri. Keberhasilan merupakan suatu pencapaian terhadap keinginan yang telah diniatkan untuk dicapai atau kemampuan untuk melewati dan mengatasi diri dari suatu kegagalan ke kegagalan berikutnya, tanpa kehilangan semangat. Keberhasilan erat kaitannya dengan kecermatan kita dalam menentukan tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan. Menurut David C. Korten berpendapat bahwa daya kerja dari suatu program pembangunan adalah fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu, program dan organisasi yang membantu. Dengan istilah yang lebih khusus, program pembangunan akan gagal memajukan kesejahteraan suatu kelompok jika tidak ada hubungan yang erat antara kebutuhan - kebutuhan pihak penerima bantuan dengan hasil program, persyaratan program dengan kemampuan nyata dari organisasi pembantu dan kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima dan proses pengambilan keputusan dari organisasi pembantu.

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam keberhasilan program yaitu program (programme), organisasi pelaksanaan program (organization), dan kelompok sasaran program (beneficiaries). Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur keberhasilan program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, Tuntutan Putusan yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Haedar Akib dan Antonius Tarigan, 2000).

Untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat keberhasilan implementasi program Kampung KB ini, dilakukan pendekatan dan wawancara dengan para informan penelitian ini. Karena itu diadakan pendekatan dan wawancara dengan Informan Kepala Negeri Halong (Ibu S. Tupenalay, dan sekretaris Bapak O.Apituley). Kedua informan ini memberikan tanggapan sebagai berikut:

“ Kami selaku unsur pimpinan Negeri Halong ini, tahu bahwa pelaksanaan program Kampung KB dari awal pembentukan sampai dengan sekarang telah dilihat berjalan dengan lancar dan baik. Hal ini terjadi karena, kegiatan sosialisasi dan layanan KIE KB dan alat kontrasepsi oleh petugas Pokja yang dilakukan dua kali dalam satu bulan, respon yang baik warga masyarakat, terutama PUS dalam menyikapi kedatangan petugas di negeri ini. Kami harus mengakui bahwa penangan program kegiatan KB sangat berkembang, dilihat dengan adanya pembentukan Kampung KB pada Negeri Halong ini ”, (Wawancara, tgl 03 - 04 Oktober 2023).

Dari hasil wawancara dengan para informan diatas, keberhasilan pelaksanaan program KB melalui langkah pembentukan Kampung KB di Negeri Halong ini, sejak dari awal pembentukannya sampai dengan sekarang telah dilihat dapat berjalan dengan lancar dan baik, karena memperoleh respon dan dukungan dari warga masyarakat (PUS), dalam menyikapi kedatangan petugas – petugas Pokja di Negeri Halong. Kondisi ini dilihat dengan adanya pembentukan Kampung KB, dengan keaktifan PUS menggunakan alat – alat kontrasepsi KB untuk dapat mengendalikan jumlah kelahiran anak cukup dua orang, dan jarak kelahiran anak minimal tiga tahun, keluarga kecil terbentuk dengan suasana bahagia dan sejahtera, seperti yang diharapkan.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil - hasil penelitian dan analisis serta pembahasan hasil penelitian sebagaimana terlihat pada bab IV diatas, maka beberapa kesimpulan penelitian ini secara spesifik atau khusus dapat dikemukakan, sebagai berikut: (1) Temuan hasil peneltian menunjukkan, pelaksanaan sosialisasi prorgam kegiatan kampung KB oleh petugas pelaksana cukup berjalan dengan lancar dan berhasil di Negeri Halong, yang dilakukan dua kali dalam satu bulan yang melibatkan masyarakat kelompok Pasangan Usia Subur (PUS), untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai arti pentingnya program KB dalam pengendalian jumlah dan jarak kelahiran anak, (2) Temuan hasil peneltian menunjukkan, keterlibatan masyarakat kelompok PUS dalam sosialisasi prorgam kegiatan kampung KB oleh petugas pelaksana cukup berjalan dengan lancar dan berhasil di Negeri Halong, yang dilakukan dua kali dalam satu bulan yang dapat membuat kelompok PUS memiliki pemahaman serta kesadaran dan kesediaan mereka menjadi peserta aktif KB dengan komitmen melakukan upaya pengendalian jumlah kelahiran anak, dan jarak kelahiran anak, untuk menghasilkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, (3) Temuan hasil peneltian menunjukkan, masyarakat kelompok PUS secara bertahap memperoleh pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi KB (KIE KB) dan alat – alat kontrasepi, serta konsultasi KB dan pelayanan kesehatan sebanyak dua kali dalam satu bulan, diikuti dengan adanya berkomitmen dan sikap konsisten dalam upaya penggunaan alat – alat kontrasepsi terutama suntikan KB, dan Pil KB, untuk proses pengendalian jumlah dan jarak kelahiran anak sesuai dengan ketentuan, agar meraih keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, (4) Temuan hasil peneltian menunjukkan, proses pelaksanaan program kegiatan pada kampung KB di Negeri Halong, cukup berjalan dengan lancar dan efektif yang ditandai dengan adanya kesediaan masyarakat kelompok PUS untuk menerima dan menjadi peserta aktif yang telah memperoleh

konsultasi dan pelayanan penggunaan alat – alat kontrasepsi, terutama suntikan KB dan Pil KB, sehingga pengendalian jumlah kelahiran anak hanya dua orang, dan terutama jarak kelahiran anak minimal tiga tahun dapat dilakukan oleh PUS di negeri sehingga keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera telah dirasakan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Amyati, A., Kurniasih, D., & Tobirin, T. (2023). *Pengaruh Faktor Determinan Terhadap Keberhasilan Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Kabupaten Banyumas* (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- Agostiono. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Rajawali Press, Jakarta.
- Agustino, Leo (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung dan Puslit KP2W Unpad.
- Alisman. (2014). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 1(2): 1-10
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Pustaka Sedia.
- Argama, Rizki. (2006). *Konstitusi Dan Pemerintahan*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Aston P., Dewi R.S. (2011). Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Alokasi Dana Desa. *Jurnal Sociopolitico*, 3(2): 97- 106.
- Badudu, J. S., & Zain, S. M. (2020). *Efektifitas Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- BkkbN. (2016). *Petunjuk Teknis Keluarga Berencana Kampung Keluarga Berencana*. Penerbit Direktorat Bina Lini Lapangan
- Boedijono. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*, 4 (1): 19 – 20
- Dimianus Ding. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, 2(2)
- Edward III, George C (etided), (1990). *Public Policy Implementing*, Jai Pres Inc, London-England. Goggin, Penerbit Malcolm L et al.
- Endah, K., & Kholiq, W. A. (2019). PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA OLEH DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KBP3A) DALAM MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SEJAHTERA (Studi Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Moderat: *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 101-112.
- Friedman. (2013). *Keperawatan Keluarga*. Yogyakarta: Penerbit Gosyen Publishing.
- Gazali, G., & Rahim, I. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. *Jurnal Fase Kemajuan Sosial dan Politik: Faksi*, 9(1), 30-47.
- Herizal, H., Mukhrilal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24-34.
- Handoko, Hani. (2012). *Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Ibrahim, A. H., Husen, T., Hariyatmoko, K., Djae, R. M., & Wance, M. (2021). *Implementation of standard operational procedures (SOP) information dissemination of BMKG tsunami early*

- warning at the geophysical statium of ternate*. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 2317-2327.
- Ibrahim, A. H., Deni, S., Saraha, S., Taher, S. B., & Wance, M. (2021). The Effectiveness of E-ID Card Services in Subdistrict City North Ternate. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 8(1), 60-69.
- Mangkuprawira, Tb.S dan Hubeis, A.V. (2007). *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nurbaena, W. O. W. (2020). Implementasi Program Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Melalui Wadah Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Tampuna Kecamatan Bungi Kota Baubau. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 3(2), 20-27.
- Nawawi, H Ismail. (2009). *Public Policy Analisis Strategi Advokasi, Teori dan Praktek*. Penerbit Putra Media Nusantara, Surabaya
- Richard M. Steers. (1999). *Efektivitas Organisasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Ripley, Rendal B. and Grace A. (1986). *Franklin. Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- Rusdiyanta dan Syarbaini, Syahrial. (2009). *Dasar-dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Selanno, H., & Wance, M. (2021). Performance Of Inspectorate In Supervision Of Government Administration In Buru Selatan Regency. *Sosiohumaniora*, 23(2), 189-157.
- Setiadi. (2008). *Konsep Dan Proses Keperawatan Keluarga*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugianto, M. A. (2021). Implementasi Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Badung Provinsi Bali. *PANCANAKA Jurnal Kependudukan, Keluarga, dan Sumber Daya Manusia*, 2(2), 44-52.
- Sinambela, dkk. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Purwanto dan Sulistyastuti. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta.
- Wahab, Solichin A. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta.
- Widjaja. (2008). *Dasar Dasar Customer Relationship. Management*. Harvarindo, Jakarta.
- Wiknjosastro H. (2005). *Ilmu Kandungan*. 3rd ed. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.